



Melancong Ke Laut

Tata Kelola Pariwisata Maritim Indonesia

Penulis: Nikolaus Loy, dkk.

Editor: Okto Irianto, dkk.

©2019 Kemenko Kemaritiman RI

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh:

Penerbit PT. Elex Media Komputindo

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta

719080847

ISBN: 978-623-00-0100-0

978-623-00-0101-7 (Digital)

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	v
Prakata	ix
Daya Dukung Ekosistem Terumbu Karang untuk Wisata Bahari sebagai Upaya Mempertahankan Kelestarian Maritim di Indonesia	1
Rohmani Sulistyati, Endang Abdur Rohman, & Mulyadi	
Promosi Berbasis Aplikasi Metode Biaya Perjalanan dan Nilai Ekonomi Gili Matra di NTB	21
Permana Ari Soejarwo & Irwan Muliawan	
Profil Ekonomi Maritim dan Pengembangan Pariwisata & Jasa Maritim di Sumatera Utara	31
Hotden L. Nainggolan, Albina Ginting, & Jongkers Tampubolon	
Dollar Pica di Raja Ampat: Politik Konservasi Orang Kampung	63
Amin Tohari	

Melancong Ke Laut

Multi-Peluang Pengembangan Potensi Pantai Gladah di Kulonprogo 85

Suryo Wibisono

Peran Diplomasi Indonesia Dalam Promosi Wisata Bahari di Pasar Internasional 99

Ludiro Madu

Keamanan Maritim dan Pembangunan Ekonomi Maritim Indonesia 119

Anta Maulana Nasution

Pengembangan Tata Kelola dan Ekosistem Pariwisata Bahari 151

Frans Teguh

Agar *Sail* Tidak Sial: Refleksi Festival *Sail* dalam Wisata Bahari Indonesia 169

Aryanta Nugraha

Masalah Pengelolaan Kawasan Wisata Pesisir di Yogyakarta 203

Sri Muryantini

Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Masyarakat di Kawasan Pantai Kabupaten Batang 217

Ida Susi Dewanti

xx

Daftar Isi

Strategi Pemasaran Wisata Bahari dengan Pendekatan DOT, BAS dan POS 237

Sigit Haryono

Pemberdayaan Industri dan Jasa Olahraga untuk Mendukung Pengembangan Industri dan Jasa Maritim 253

Andi Mulya

Biografi Penulis 269

xxi

**Analisis Keragaan Ekonomi Kelautan dan Arah Kebijakan
Pengembangan Pariwisata Bahari dan Jasa Kelautan
Propinsi Sumatera Utara**

**Hotden Leonardo Nainggolan¹⁾, Jongkers Tampubolon²⁾,
Albina Ginting³⁾,**

**^{1,2)} Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas HKBP Nommensen Medan.**

**Jl. Sutomo No. 4A Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
email : hotdenleonardo76@gmail.com**

Abstract

Economic development with empowering of the natural resources of dryland has stagnated growth, requiring the marine sector to be well managed to spur economic growth. The potential of marine and fishery of North Sumatra consists of capture fishery of 276,030 tons/year in the Malakan Strait and in the Indian Ocean for 1,076,960 tons/ year. The production of aquaculture consists of terrestrial fisheries of 20,000 ha and aquaculture of 100,000 ha, freshwater cultivation 81,372.84 ha. Based on data analysis result known; a) the value of ICOR for the fisheries sub-sector in North Sumatra are 3.210 (year 2016) and 3,121 (year 2017) which indicates this sub-sector has good prospects for the making of investments, as well as showing a relatively efficient for investment when compared with other sub-sectors; b) sub-sectors of the marine has an average value of ICOR 3,368 (year 2016) and 3,344 (year 2017) which shows of this sub-sector is relatively efficient for investment when compared to other sub-sectors of the gross domestic product formation of North Sumatra, c) Value ILOR of maritime sectors North Sumatra average of 5.837 (year 2016) and 6,160 (year 207), which shows that the marine sector is good enough to absorb the labor force, d) capable maritime sector contributed 8.37% to gross domestic product of North Sumatra province in year 2017, e) 2016 fisheries sub-sector contributed 27.71% to the maritime sector and increased to 20.01% by 2017. Based on the suggested discussion; a) Development of marine services should be directed to; 1) sustainable economic growth with marine services as the driving force; 2) improving the welfare of business actors, especially stakeholders related to the marine services industry; 3) preservation of the environment and marine resources; 4) make marine services as capital for marine development. And suggestions that can be given are; a) to support the development of marine economy in North Sumatra to be established village unit cooperatives for fishermen, b) The local government is

expected to deal with the problems faced by fishermen and fish farmers and provide the infrastructure to support the activities of fishermen.

Key word : economy, marine tourism, maritime.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara bahari yang besar di dunia, memiliki sumber daya (SD) ekonomi kelautan yang potensial untuk dikembangkan. Pada era globalisasi dan sistem perdagangan bebas saat ini, tingkat persaingan antar bangsa sudah semakin kompetitif. Dengan demikian sektor ekonomi harus mampu menghasilkan barang dan jasa (*goods and services*) yang berdaya saing tinggi.

Keterbatasan pengembangan ekonomi berbasis daratan dan lambat nya pertumbuhan ekonomi mengharuskan sektor kelautan dikelola dengan optimal karena berpotensi menghasilkan produk yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Disamping itu permintaan produk-produk kelautan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga ekonomi kelautan akan menjadi keunggulan kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada berbagai wilayah (Mira, 2013 ; Syarief *et al.*, 2014; Rinanti, 2013; Ariani *et al.*, 2014), dan dampaknya bagi kegiatan ekonomi wilayah adalah dalam bentuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bahkan pendapatan nasional (Hamidi *et al.*, 2011 ; Rizal, 2013; Tatali *et al.*, 2013).

Bidang kelautan terdiri dari berbagai sektor yang dapat dikembangkan untuk memajukan perekonomian nasional dan daerah yaitu; a) perikanan tangkap dan budidaya; b) industri pengolahan hasil perikanan; c) industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi; d) pariwisata bahari; e) angkutan laut; f) jasa perdagangan; g) industri maritim; h) sumberdaya non-konvensional; i) warisan budaya (*cultural heritage*); j) jasa lingkungan, konservasi dan biodiversitas (Darsono, 1999:9).

Darsono (1999:2) menyampaikan bahwa wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya, alam baik sumber daya yang dapat pulih (perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dll.), maupun sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (minyak bumi, gas, mineral dan bahan tambang lainnya). Dan Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia, dengan ekosistem

pesisir yang khas seperti hutan mangrove, terumbu karang (*coral reefs*), dan padang lamun (*sea grass beds*).

Propinsi Sumatera Utara merupakan propinsi besar diluar Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 14. 102.911 jiwa (Tahun 2016), dengan tingkat kepadatan penduduk 193 jiwa/ km. Penduduk terbanyak berada di Kota Medan yaitu 2.229.408 jiwa, disusul Kabupaten Deli Serdang 2.072.521 jiwa dan penduduk yang paling sedikit berada di Kabupaten Pakpak Barat sebanyak 10.367 jiwa (BPS, Sumatera Utara Dalam Angka, 2017). Propinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 181.860,65 km² terdiri atas daratan 71.680,68 km² atau sebesar 3.73 % dan perairan 110.000,65 km² termasuk Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil di perairan bagian Barat dan Timur Pulau Sumatera, dan umumnya kabupaten/ kota diwilayah ini merupakan kawasan pesisir sehingga potensial untuk dikembangkan menjadi sentra ekonomi kelautan dan perikanan yang lebih maju dan berkelanjutan.

2. Potensi Sumber Daya Alam Sumatera Utara

Propinsi Sumatera Utara memiliki sumber daya alam yang potensial di kembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Potensi sumber daya tersebut meliputi; sektor pertanian, perikanan, peternakan kehutanan dan sumber daya lainnya sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Potensi Sumber Daya Alam Propinsi Sumatera Utara (Tahun 2016).

No	Jenis Sumber Daya	Pontensi	
		Areal panen (ha)	Produksi (Juta ton)
1	Pertanian		
	* Padi dan Hortikultura	1.697.293,0	7,3
	* Sayur-sayuran dan buah-buahan	108.398,0	2,5
	* Perkebunan	1.801.923,0	4,2
2	Perikanan		
	* Budidaya	41.310,0	51,3
	* Penangkapan/ laut	-	354.898,0
3	Peternakan		
	* Kulit		112.280,0
	* Telur		352.931,0
	* Daging		90.344,0
4	Kehutanan		
	* Hasil Hutan	1.035.690,0	1.617.155,0

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2018

Tabel 1 menunjukkan Tahun 2016 Sumatera Utara memiliki potensi pertanian, meliputi; tanaman padi dan hortikultura 1.697.293 ha dengan potensi produksi 7,3 juta ton. Sektor perikanan budidaya dengan potensi produksi 51.027 ton dan perikanan/penangkapan laut dengan potensi 354.898 ton.

BPS Sumatera Utara, PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha (2017), menyampaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara menurut lapangan usaha/ sektor dirinci menjadi 18 lapangan usaha/ sektor dan sebagian lapangan usaha dirinci menjadi sub-lapangan usaha/ sub-sektor yang disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KLBI) 2009, sebagaimana pada Tabel 2. Lapangan usaha mencakup sub-lapangan usaha pertanian yang terdiri atas; tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, sub-lapangan kehutanan terdiri atas; penebangan kayu dan sub-lapangan usaha perikanan. Sub-lapangan usaha ini menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara sebesar 37,52% sesuai dengan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sukernas) 2017.

Data BPS (2017) menunjukkan bahwa sub-lapangan usaha/ sub-sektor perikanan memiliki peran penting bagi pertumbuhan sektor ekonomi Propinsi Sumatera Utara disamping sub-lapangan usaha/ sub-sektor lainnya, sebagaimana pada Tabel. 2.

Tabel 2. Kontribusi dan Perkembangan Lapangan Usaha/Sektor Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADH Konstan Tahun 2010 Propinsi Sumatera Utara (Tahun 2015-2017).

No	Kategori PDRB (Lapangan Usaha/Sektor/Sub-Sektor)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)/ Tahun			+/- (%) / Tahun		% kontribusi
		2015	2016	2017	2015/2016	2016/2017	
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	110.066,00	115.179,69	121.300,04	4,6%	5,3%	24,88%
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa	96.506,08	101.220,09	106.740,98	4,9%	5,5%	21,89%
a	Tanaman Pangan	16.164,34	17.388,24	18.166,73	7,6%	4,5%	3,73%
b	Tanaman Hortikultura	11.225,11	11.388,24	12.105,17	1,5%	6,3%	2,48%
c	Tanaman Perkebunan	59.798,23	62.469,40	65.915,65	4,5%	5,5%	13,52%
d	Peternakan	8.472,24	9.046,40	9.647,25	6,8%	6,6%	1,98%
e	Jasa Pertanian dan Perburuan	846,15	862,89	906,19	2,0%	5,0%	0,19%
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	4.078,86	3.934,32	3.944,90	-3,5%	0,3%	0,81%
3	Perikanan	9.481,06	10.025,28	10.614,16	5,7%	5,9%	2,18%
B	Pertambangan dan Penggalian	5.814,94	6.144,99	6.436,60	5,7%	4,7%	1,32%
1	Pertambangan minyak dan Gas Bumi	618,83	609,90	579,76	-1,4%	-4,9%	0,12%
2	Pertambangan Batu Bara dan Lignit	-	-	-	0,0%	0,0%	0,00%
3	Pertambangan Bijih Logam	1.126,69	1.167,83	1.142,52	3,7%	-2,2%	0,23%
4	Pertambangan dan Penggalian lainnya	4.069,42	4.367,26	4.714,32	7,3%	7,9%	0,97%
C	Industri Pengolahan	86.318,90	90.680,99	92.777,25	5,1%	2,3%	19,03%
1	Industri Batu Bara dan Pengilangan Migas	14,28	14,20	13,88	-0,6%	-2,3%	0,00%
2	Industri Makanan dan Minuman	61.268,94	64.622,05	66.562,68	5,5%	3,0%	13,65%
3	Pengolahan Tembaku	1.360,14	1.462,95	1.577,80	7,6%	7,9%	0,32%
4	Industri Tekstil dan Pakaian jadi	237,18	237,88	234,03	0,3%	-1,6%	0,05%
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	273,02	276,19	270,71	1,2%	-2,0%	0,06%
6	Industri dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	1.082,28	1.092,29	1.127,08	0,9%	3,2%	0,23%
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	1.098,10	1.193,28	1.297,62	8,7%	8,7%	0,27%
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2.421,24	2.299,59	2.412,42	-5,0%	4,9%	0,49%
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6.004,12	6.092,06	6.339,68	1,5%	2,4%	1,28%
10	Industri Barang Galian bukan Logam	1.638,60	1.692,61	1.660,56	3,3%	-1,9%	0,34%
11	Industri Logam Dasar	9.282,90	10.003,01	9.656,91	7,8%	-3,5%	1,98%
12	Industri Barang dari Logam, Komputer	766,59	789,61	1.660,56	3,0%	110,3%	0,34%
13	Industri Mesin dan Penyuplai YITDL	261,21	271,51	287,73	3,9%	6,0%	0,06%
14	Industri Alat Angkutan	57,56	59,50	57,42	3,4%	-3,5%	0,01%
15	Industri Furniture	494,17	515,65	679,75	4,3%	31,8%	0,14%
16	Industri Pengolahan lain, Jasa Reparasi, dll.	58,56	58,42	60,66	-0,2%	3,8%	0,01%
D	Pengadaan Listrik dan GAS	593,97	622,76	677,08	4,8%	8,7%	0,14%
1	Ketenagalistrikan	458,14	475,20	493,08	3,7%	3,8%	0,10%
2	GAS	135,83	147,20	183,42	8,4%	24,6%	0,04%
E	Pengadaan Air	421,96	446,05	475,82	5,7%	6,7%	0,10%
F	Konstruksi	54.248,91	57.286,44	61.175,99	5,6%	6,8%	12,55%
G	Pengadaan Besar dan Eceran dan Reparasi	76.697,03	80.702,74	85.440,69	5,2%	5,9%	17,53%
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor	6.333,48	6.396,36	6.444,35	1,0%	0,8%	1,32%
2	Perdagangan Besar dan Eceran	70.363,55	74.306,38	78.996,34	5,6%	6,3%	16,20%
H	Transportasi dan Pergudangan	20.165,19	21.390,03	22.961,90	6,1%	7,3%	4,71%
1	Angkutan Rel	101,67	110,26	120,90	8,4%	9,6%	0,02%
2	Angkutan Darat	10.501,68	11.185,82	12.167,07	6,5%	8,8%	2,50%
3	Angkutan Laut	2.006,24	1.942,65	1.945,78	-3,2%	0,2%	0,40%
4	Angkutan Sungai/ Danau dan Penyeberangan	123,17	131,10	139,59	6,4%	6,5%	0,03%
5	Angkutan Udara	3.110,20	3.377,61	3.592,80	8,6%	6,4%	0,74%
5	Pergudangan dan Jasa Angkutan	4.322,22	4.642,58	4.995,78	7,4%	7,6%	1,02%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	9.866,78	10.512,20	11.282,16	6,5%	7,3%	2,31%
1	Penyediaan Akomodasi	1.392,77	1.343,54	1.355,66	-3,5%	0,9%	0,28%
2	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.474,00	9.168,66	9.926,50	8,2%	8,3%	2,04%
J	Informasi dan Komunikasi	11.055,36	11.913,13	12.933,95	7,8%	8,6%	2,65%
K	Jasa Keuangan	13.957,95	14.531,04	14.601,55	4,1%	0,5%	2,99%
1	Bank	9.755,34	10.107,88	9.966,34	3,6%	-1,4%	2,04%
2	Asuransi dan Dana Pensiun	1.164,45	1.240,63	1.308,72	6,5%	5,5%	0,27%
3	Jasa Keuangan Lainnya	2.753,59	2.888,35	3.024,43	4,9%	4,7%	0,62%
4	Jasa Penunjang Keuangan	284,57	294,18	302,06	3,4%	2,7%	0,06%
L	Real Estate	18.118,23	19.187,89	20.637,93	5,9%	7,6%	4,23%
M	Jasa Perusahaan	3.836,94	4.065,41	4.368,69	6,0%	7,5%	0,90%
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	14.642,08	15.083,58	15.463,27	3,0%	2,5%	3,17%
O	Jasa Pendidikan	8.904,74	9.341,37	9.802,14	4,9%	4,9%	2,01%
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.066,72	4.366,28	4.699,93	7,4%	7,6%	0,96%
Q	Jasa Lainnya	2.179,19	4.320,88	2.496,24	98,3%	-42,2%	0,51%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		440.954,89	465.775,47	487.531,23	5,6%	4,7%	100,00%

Sumber : Data Sekunder, PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha (2013-2017), diolah 2018.

Tabel 2 menunjukkan lapangan usaha/ sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mampu memberikan kontribusi 24,88% terhadap PDRB Sumatera (Tahun 2017) atas dasar harga konstan 2010, angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi lapangan usaha/ sektor industri pengolahan yaitu 19, 03%, lapangan usaha/ sektor pengadaan besar, eceran dan reparasi 17,53% dan lapangan usaha/ sektor konstruksi sebesar 12, 55% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara. Tabel 2 juga menunjukkan Tahun 2017 sub-lapangan usaha/ sub-sektor perikanan mampu memberikan kontribusi sebesar 2,18% terhadap PDRB Sumatera Utara dengan laju pertumbuhan yang signifikan yaitu 5,7% dari 2105 ke 2016 dan sebesar 5,9% dari 2016 ke tahun 2017. Kemudian Tabel 2 juga menunjukkan pada Tahun 2017 sub-lapangan usaha/ sub-sektor angkutan laut yang berbicara mengenai jasa kelautan/ kemaritiman mampu memberikan kontribusi sebesar 0,40% bagi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015) menyampaikan Propinsi Sumatera Utara tahun 2014 mampu menghasilkan produk kelautan dan perikanan, yang bersumber dari; perikanan tangkap di selat Malaka 276.000 ton dan di Samudera Hindia 1.076.960 ton. Produksi perikanan budidaya yaitu; budidaya tambak 20.000 ha, budidaya laut 100.000 ha, budidaya air tawar 81.372,84 ha dan perairan umum 155.797 ha. Produk tersebut dihasilkan dikawasan pesisir Sumatera Utara dengan panjang pantai 1.300 km yang terdiri dari Pantai Timur 545 km, Pantai Barat 375 km, Kepulauan Nias dan Pulau-Pulau Baru sepanjang 380 km (DKP Sumut, 2015).

Secara umum pengembangan sektor perikanan Propinsi Sumatera Utara dibagi menjadi beberapa wilayah kerja sesuai dengan potensi masing-masing (Ikbar, 2015) yaitu :

a. Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara. Terdiri dari 12 kabupaten/kota yaitu; Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Kemudian Kota; Gunung Sitoli, Sibolga dan Padang Sidempuan. Wilayah ini potensial untuk penangkapan dan pengolahan ikan. Budidaya laut terdiri dari; rumput laut, kerapu dan kakap. Budidaya tawar yang terdiri dari; mas, nila, lele, patin, gurame, tawes dan nila. Budidaya tambak terdiri dari; udang vaname, udang windu, kerapu, kakap, bandeng.

- b. Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara. Terdiri dari 10 kabupaten/kota yaitu; Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Karo, Dairi, Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, dan Pakpak Bharat. Kemudian Kota; Pematang Siantar dan Tebing Tinggi. Wilayah ini potensial untuk penangkapan ikan di perairan umum dan pengolahan ikan. Budidaya air tawar yaitu; nila, mas, lele, patin dan gurame.
- c. Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara. Terdiri atas 11 kabupaten/kota yaitu; Kabupaten Langkat, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Batubara. Kemudian Kota; Medan, Tanjung Balai dan Binjai. Wilayah ini potensial untuk penangkapan dan pengolahan ikan. Budidaya laut yang terdiri dari; kerapu, kakap, dan kerang hijau. Budidaya tawar yaitu; mas, nila, lele, patin, gurame, grass carp, lobster air tawar, bawal tawar dan ikan hias. Budidaya tambak yaitu; rumput laut, udang vaname, udang windu, kerapu, kakap, bandeng, sedangkan budidaya perairan umum yaitu mas, nila, dll.

3. Analisis Keragaan Ekonomi Kelautan (*Ocean Economy*) Propinsi Sumatera Utara

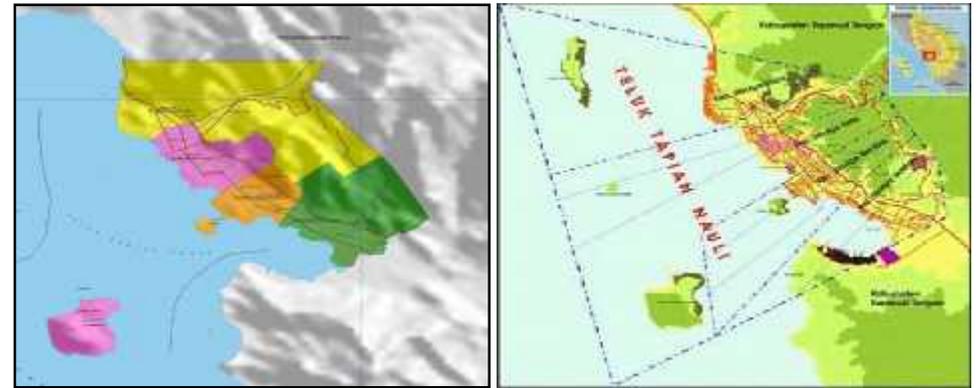
3.1. Strategi Dasar Pembangunan dan Aksi Pembangunan Kelautan Sumatera Utara

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2015 menyampaikan potensi hasil perikanan laut di Indonesia mengalami fluktuasi. Tahun 1997 tercatat 6,190 juta ton, Tahun 1999 sebesar 6,4 juta ton, Tahun 2001 sebesar 6,409 juta ton, dan Tahun 2011 sebesar 6,502 juta ton. Namun demikian jika potensi perikanan tangkap Indonesia dikelola dengan optimal akan mampu menyumbang devisa negara hingga 3.000 triliun/tahun. Namun kenyataan bahwa potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 225 triliun/tahun atau sekitar 7,5%.

Kondisi Indonesia sebagai negara maritim mengalami berbagai permasalahan, di beberapa tempat telah terjadi penurunan hasil tangkapan. WWF Indonesia (2014) menuturkan di WWP 571 yang mencakup Selat Malaka dan laut Andaman terjadi penurunan produksi perikanan tangkap di laut dari 509.171 ton (Tahun 2012) menjadi 475.489 ton (Tahun 2013). Kemudian di WWP 572 Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan selat Sunda juga terjadi penurunan produksi perikanan tangkap dari 576.632 ton (Tahun 2012) menjadi 575,091 ton (Tahun 2013).

Hasil yang sama ditunjukkan dari angka *catch* per unit yang terus mengalami penurunan pada rentang tahun 2004-2011. Analisa tersebut menggambarkan realitas di lapangan, nelayan harus menempuh jarak yang lebih jauh dan mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar untuk mendapat hasil. Hal yang sama terjadi di Propinsi Sumatera Utara, sehingga perlu dilakukan pemetaan potensi sebagai upaya untuk membangun sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (*sustainable*). Pemerintah Sumatera Utara berusaha mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peran pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya adalah Kota Sibolga dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Kota Sibolga merupakan kota tertua di Sumatera Utara yang terletak di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara memiliki potensi kelautan yang luar biasa dan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan kemaritiman di Sumatera Utara. Kota Sibolga merupakan salah satu kota di wilayah pesisir Pantai Barat Sumatera Utara yang letaknya sangat strategis dengan jumlah penduduk 84.481 jiwa dengan luas wilayah 10,77 km². Di wilayah ini telah dilakukan pengembangan pelabuhan perikanan Kota Sibolga sebagaimana disajikan pada Gambar. 1



Gambar. 1. Pengembangan dan Rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Kota Sibolga (Sumber : BPS Kota Sibolga Dalam Angka, 2016).

Pemerintah Kota Sibolga telah berbenah menggali potensi kemaritiman untuk mampu menjadi poros maritim nusantara dalam sektor perikanan,

perdagangan barang, jasa serta pariwisata bahari. Sejumlah bangunan kemaritiman telah berdiri, diantaranya; tempat pelelangan ikan (TPI), pabrik es, pengesakan ikan (*cold storage*), gedung penyuluh perikanan, sarana pengisian bahan bakar nelayan berupa APMS, sarana pusat penjualan ikan (pusat pasar ikan), pelabuhan penyeberangan kapal feri, jalan transportasi ke lokasi usaha perikanan, steiger tempat bersandar kapal dan lain sebagainya termasuk dukungan keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pondok Batu Sibolga (Anonimus, 2015).

Kota Sibolga merupakan salah satu sentra produksi ikan di Kawasan Pantai Barat Sumatera, bahkan sub lapangan usaha/sub-sektor perikanan ini mampu berkontribusi sebesar 23,87% bagi pembentukan struktur perekonomian berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sibolga atas dasar harga konstan tahun 2000 (Panggabean, 2016:1). Lebih lanjut Panggabean (2016:2) menyampaikan keberlangsungan subsektor perikanan perlu didukung perencanaan wilayah yang efektif dan efisien, untuk menemukan dan mengenali kondisi dan potensi yang ada baik dari sisi fisik maupun dari para pelaku usaha tersebut, sehingga dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk peningkatan peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sibolga.

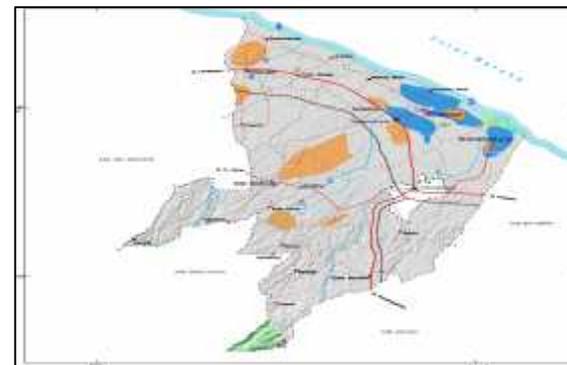
Dengan demikian program pembangunan kelautan akan menghasilkan perkembangan di bidang; 1) sektor perikanan; 2) sektor pariwisata bahari; 3) sektor pertambangan; 4) sektor industri maritim; 5) sektor angkutan laut; 6) sektor bangunan kelautan; 7) sektor jasa kelautan. Pemerintah Kota Sibolga juga menyadari bahwa sektor kemaritiman menjadi kunci utama perkembangan dan pertumbuhan Kota Sibolga, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya manusia (SDM) yang handal telah dipersiapkan dengan membangun Perguruan Tinggi (PT), yaitu Akademi Komunitas Negeri (AKN) Sibolga, dengan jurusan; Budidaya Perikanan, Budidaya Perikanan Air Tawar dan Teknologi Pangan Berbasis Perikanan, yang telah berdiri dan beroperasi sejak Tahun 2014. Biaya pendidikan mahasiswa sepenuhnya ditanggung lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga. Pembangunan kemaritiman di Kota Sibolga sepenuhnya digalakkan atas dasar sejarah kemaritiman, disertai didukung letak geografis, Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Manusia (SDM) serta potensi pariwisata, termasuk peluang usaha (peluang bisnis) yang luas dari sektor ini.

Kota Sibolga juga merupakan jalur transportasi dan perdagangan maritim atau pintu gerbang perdagangan di Pantai Barat Sumatera. Pada masa itu, perairan laut Teluk Tapian Nauli bersama jalur Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, laut sekitar pulau - pulau di sekitar Maluku dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan nasional maupun internasional. Jalur-jalur ini tercatat sebagai jalur strategis, sehingga banyak kapal-kapal dari berbagai negara di Eropa dan Timur Tengah menggunakannya untuk perdagangan. Jalur perdagangan kota Sibolga sendiri, awalnya terletak di pulau Poncan Ketek, yang merupakan bandar kecil di Teluk Tapian Nauli. Tapi pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, atau tepatnya pada abad ke-19 didirikan Bandar Baru yaitu Kota Sibolga yang sekarang (Anonimus, 2017).

Disamping itu Kota Sibolga yang berada diantara (ditengah) daerah-daerah hinterland merupakan satu-satunya pintu gerbang masuknya barang-barang dan kebutuhan pokok ke daerah hinterland baik dari wilayah Indonesia ataupun internasional lewat jalur laut dan sebaliknya dari daerah hinterland ke seluruh wilayah Indonesia ataupun internasional untuk wilayah Pantai Barat Sumatera Utara (Anonimus, 2017).

Kemudian Kabupaten Serdang Bedagai, juga merupakan wilayah potensial untuk pengembangan ekonomi kemaritiman di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara. Dalam hal ini Pemerintah Sumatera Utara melalui Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, melakukan pengelolaan sumber daya kelautan yang berbasis masyarakat. Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor unggulan dalam memajukan perekonomian wilayah ini. Wilayah pesisir dan laut Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan selat Malaka telah menjadi tumpuan penunjang perekonomian bagi masyarakat pesisir daerah ini, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.





Gambar. 2. Peta Kelautan Lokasi Pengembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Serdang Badagai (Sumber: BPS, Kabupaten Serdang Badagai Dalam Angka, 2016).

Peran aktif masyarakat nelayan dan pembudidaya memegang peran penting bagi keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini penting karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) jika dibandingkan dengan luas lautan yang harus diawasi. Disamping karena masyarakat nelayan tergolong masyarakat miskin yang bermukim di desa-desa pesisir bahkan secara umum masih berpendidikan rendah dan sebagian besar bahkan tidak tamat SD (Darsono, 1999: 9). Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan kelompok masyarakat pengawas yang bertugas membantu pemerintah dalam melaporkan adanya pelanggaran jalur penangkapan ikan dan praktik ilegal fishing.

Pelaksanaan pengawasan perikanan menjadi mutlak diperlukan mengingat luasnya wilayah perairan kawasan Serdang Bedagai. Disamping itu pengawasan ini sangat penting dilakukan mengingat produksi kelautan ini terkait dengan ketersediaan sumber pangan dan sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat pesisir. Dengan demikian pengawasan ini harus diimplementasikan dengan sistem *monitoring, controlling, and surveillance* di zona ekonomi eksklusif untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan di laut lepas, dan memberantas ilegal fishing (Anonimus, 2014a).

3.2. Kajian Kebutuhan Investasi Pembangunan Bidang Kelautan Sumatera Utara

Analisis kebutuhan investasi sektor perikanan dapat didasarkan pada nilai ILOR (*Incremental Labor Output Ratio*) dan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). ILOR merupakan koefisien yang menghubungkan peningkatan jumlah tenaga kerja dan output yang dihasilkan. ICOR adalah indikator untuk mengukur sejauh mana efisiensi dari suatu investasi. Makin rendah angka ICOR, maka investasi yang dilakukan semakin efisien. ICOR dapat dihitung sebagai rasio investasi terhadap PDRB (Irawan, 2010)

ICOR merupakan metoda yang dapat digunakan untuk menghubungkan pertumbuhan faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. ICOR juga menghubungkan besarnya pembentukan modal tetap domestik bruto dengan pertambahan produk domestik regional bruto (PDRB). Hal ini dapat digunakan untuk menunjukkan efisiensi suatu perekonomian dalam menggunakan barang modal. Dalam perencanaan makro, ICOR dapat digunakan untuk menaksir besarnya kebutuhan modal yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi (Daryanto dan Yundy, 2010)

Berdasarkan analisis data diketahui nilai koefisien ILOR dan ICOR bidang kelautan Propinsi Sumatera Utara sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Koefisien ICOR dan ILOR Bidang Kelautan Sumatera Utara Tahun 2016-2017.

No	Sub-lapangan usaha/sub-sektor bidang kelautan	Nilai Indeks ICOR (tahun)		Nilai Indeks ILOR (tahun)	
		2016	2017	2016	2017
1	Perikanan	3,210	3,121	6,412	6,825
2	Energi dan Sumberdaya Mineral	3,763	3,490	5,650	5,187
3	Industri Maritim (Pengilangan minyak bumi, LNG, industri maritim lainnya)	3,227	3,511	6,582	6,198
4	Angkutan Laut	3,414	3,378	7,510	6,899
5	Pariwisata Bahari	3,030	3,012	5,150	5,039
6	Bangunan Kelautan	3,215	3,208	4,024	5,987
7	Jasa Kelautan Lainnya.	3,720	3,487	5,530	6,984
Nilai Rata-rata		3,368	3,315	5,837	6,160

Sumber : Data Sekunder, diolah 2018

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai ICOR untuk sub-lapangan usaha/sub-sektor perikanan di Sumatera Utara pada Tahun 2016 adalah 3,210 dan menjadi 3,121

pada Tahun 2017 hal ini menunjukkan bahwa sub-lapangan usaha/sub-sektor ini mempunyai prospek yang cukup baik untuk penanaman investasi. Nilai ICOR sub-lapangan usaha/sub-sektor sebesar 3,210 (Tahun 2016) dan 3,212 (Tahun 2017) sekaligus menunjukkan bahwa sub-lapangan usaha/sub-sektor ini relatif efisien untuk investasi jika dibandingkan dengan sub-sektor lainnya. Dengan mengetahui Nilai ICOR untuk 7 (tujuh) sub-lapangan usaha/sub-sektor bidang kelautan sebagaimana Tabel 3, diketahui nilai ICOR rata-rata untuk bidang kelautan Propinsi Sumatera Utara sebesar 3,368 (Tahun 2016) dan 3,315 (Tahun 2017) menunjukkan bahwa bidang kelautan ini relatif efisien untuk investasi jika dibandingkan dengan bidang pada lapangan usaha/ sektor lain pembentuk produk domestik regional bruto (PDRB) Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana pada Tabel 3, juga diketahui nilai ILOR bidang kelautan Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan koefisien yang menghubungkan peningkatan jumlah tenaga kerja dan output yang dihasilkan. Tabel 3 menunjukkan nilai indeks ILOR untuk bidang kelautan Propinsi Sumatera Utara dengan rata-rata 5,837 (Tahun 2016) dan 6,160 (Tahun 2017), hal ini menunjukkan bahwa usaha kelautan ini merupakan bidang usaha yang cukup baik dalam menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan produksinya.

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana pada Tabel 3, diketahui nilai ICOR sub-lapangan usaha/ sub-sektor pariwisata bahari sebesar 3,030 (Tahun 2016) dan 3,012 (Tahun 2017) sehingga sub-lapangan usaha/ sub-sektor pariwisata bahari ini merupakan salah satu sub-sektor yang paling efisien untuk dikembangkan dan mempunyai resiko paling kecil untuk penanaman investasi di Sumatera Utara jika dibandingkan dengan sub-lapangan usaha/sub-sektor lainnya. Disamping bahwa sub-lapangan usaha/sub-sektor ini tinggi dalam penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh nilai ILOR sebesar 5,150 (Tahun 2016) dan 5,039 (Tahun 2017).

Berdasarkan hal tersebut maka direkomendasikan tiga hal yang harus dilakukan berkaitan dengan kebijakan pengembangan pariwisata bahari di Propinsi Sumatera Utara, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekonomi kelautan dan kemaritiman, yaitu: a) Memperbesar dan memperluas diversifikasi sektor-sektor kelautan di Sumatera Utara; b) Memperbanyak investasi dengan memberikan dorongan/stimulus pada sektor-sektor yang mempunyai ICOR yang relatif rendah (terutama sektor pariwisata dan perikanan); c) Meningkatkan efisiensi yang mencakup alokasi usaha yang

optimum berdasarkan jenis usaha, lokasi dan *compatibility* antar sektor.

Berkaitan dengan hal itu Pemerintah Sumatera Utara bersama masyarakat mendukung sepenuhnya program Pemerintahan Jokowi-JK yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia untuk kesejahteraan Indonesia. Dukungan tersebut sejalan dengan potensi kemaritiman Sumatera Utara dimana lebih dari 60% wilayah Sumatera Utara adalah laut dengan panjang pantai 1.300 km. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan “Dialog Kebangsaan dengan Tema Memberdayakan potensi Maritim Sumatera Utara dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” yang dilaksanakan Tanggal 17 Nopember 2016 di Markas Komando Lantamal di Belawan.

Hal penting dari dialog tersebut adalah bagaimana mengantisipasi persoalan dalam pengembangan kemaritiman di Sumatera Utara, diantaranya; a) infrastruktur kemaritiman yang belum memadai, b) kurangnya lembaga pendidikan kemaritiman, c) pelanggaran yang terjadi serta penegakan hukum yang belum maksimal, d) kawasan kemaritiman di wilayah Sumatera Utara semakin rentan terhadap berbagai ancaman karena posisinya yang strategis, sehingga dibutuhkan keterpaduan dan lintas sektoral untuk mengelolanya.

Dalam mendukung program kemaritiman tersebut, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengambil langkah-langkah sebagai berikut ;

1. Menghimbau pemerintah kabupaten/ kota yang memiliki wilayah laut dan pantai mengembangkan pendidikan berbasis kelautan di daerah masing-masing.
2. Pemerintah daerah wajib menghadirkan lembaga pendidikan setingkat SMK maupun sekolah tinggi di kawasan yang berbasis sumberdaya pesisir.
3. Potensi perikanan di pantai barat dan timur harus dioptimalkan, mengingat potensi perikanan Selat Malaka mencapai 276.000 ton/tahun.
4. Pemerintah Sumatera Utara telah membuat program “peduli nelayan”, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan mengasuransikan nelayannya. Tahun 2016 Pemerintah Sumatera Utara telah mengasuransikan 3.400 nelayan di berbagai kabupaten/ kota.
5. Pemerintah Sumatera Utara telah membuat program untuk pemberian bantuan dan pembinaan kepada nelayan dan keluarganya, sebagai suatu bentuk pemberdayaan (Anonimus, 2014b)

3.3. Kajian Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan Sumatera Utara Untuk Pembangunan Daerah

Panjang garis pantai Provinsi Sumatera Utara mencapai 545 km di wilayah Pantai Timur, yakni dari batas Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) di sebelah Utara hingga ke batas Propinsi Riau di sebelah Selatan yang terhampar dekat Selat Malaka. Di wilayah Pantai Barat sepanjang 375 km, dan sekitar 380 km merupakan garis pantai di Pulau-pulau Nias. Sektor perikanan merupakan sektor andalan bagi Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan sektor kelautan yang dilakukan didasarkan pada pendekatan pembagian tiga wilayah pengembangan yaitu; wilayah Pantai Barat, wilayah Pantai Timur dan Dataran Tinggi Sumatera Utara.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2016 menyampaikan potensi perikanan laut Sumatera Utara sudah mulai mengkhawatirkan, dan telah terjadi ketimpangan potensi sumber daya laut antara perairan Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera Utara. Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara menjadi ujung tombak perikanan tangkap, baik untuk pasar lokal, ekspor, maupun industri perikanan yang berlokasi di Belawan Kota Medan dan Kota Sibolga sebagai pelabuhan perikanan terbesar Sumatera Utara.

Badan Riset Kelautan dan Perikanan Tahun 2001 mencatat, potensi perikanan di perairan Pantai Timur Sumatera Utara (sekitar Selat Malaka) sekitar 276.000 ton/tahun. Sedangkan pemanfaatan per tahun 2003 tercatat 255.499,2 ton. Keadaan ini menunjukkan potensi perairan Pantai Timur sekitar Selat Malaka sudah sulit dioptimalkan karena tingkat pemanfaatannya mencapai 92%. Data Badan Riset Kelautan tersebut setidaknya memberi gambaran bahwa eksploitasi potensi perikanan tangkap di Propinsi Sumatera Utara sudah mulai timpang. Bandingkan dengan potensi perikanan di Pantai Barat Sumatera Utara (sekitar Samudera Hindia), dengan potensi 1.076.960 ton/tahun, dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 96.597,1 ton (8,96%).

Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sumatera Utara harus berupaya melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber daya perikanan tangkap agar terjadi keseimbangan sumber daya ikan, dengan cara bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/ kota sebagai penanggung jawab teritorial. Selain itu, untuk pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan di Sumatera Utara perlu dilakukan pengawasan pantai secara

berkesinambungan. Langkah-langkah di atas harus dilakukan untuk menjamin produksi perikanan di Sumatera Utara. Apalagi lonjakan produksi penangkapan ikan daerah ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan potensi yang ada. Penggarapan potensi perikanan laut yang timpang pasti akan mengancam kelangsungan hidup nelayan ke depan.

Hasil penelitian Liu *et al* (2007:6) ketimpangan tersebut dapat diatasi dengan melakukan pembangunan ekonomi kelautan secara berkelanjutan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan konsep pembangunan kelautan terintegrasi (*integrated coastal development*), dengan memperkuat dan meningkatkan kerja sama antar stake holder sektor kelautan dan industri kelautan mulai dari hulu hingga hilir dan konsolidasi antar pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah (Mairisa, 2017:582). Dengan demikian pendekatan produksi yang didasarkan pada permintaan pasar terhadap komoditas dari bidang kelautan harus lebih diperhatikan. Permintaan pasar tentu akan merangsang pemanfaatan potensi sumberdaya. Pemanfaatan sumberdaya tersebut, didasarkan pada; potensi sumberdaya yang masih besar yang harus didukung dengan berbagai kebijakan dalam menjamin ketersediaan faktor-faktor produksi (Nurhuda *dkk*, 2013:118).

Pemanfaatan faktor-faktor produksi tentu akan menghasilkan produksi (ikan dan hasil laut lainnya), guna memenuhi permintaan pasar tersebut. Besarnya produksi dari bidang kelautan/ lapangan usaha kelautan secara keseluruhan merupakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bidang kelautan. Data BPS (2017) menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sub-lapangan usaha/ sub-sektor bidang kelautan atas dasar harga konstan (milyar rupiah) Tahun 2015-2017, sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Produk Domestik Bruto (PDRB) dari Sub-lapangan Usaha/ Sub-sektor Bidang Kelautan atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah) Propinsi Sumatera Utara, Tahun 2015-2017.

No	Sub lapangan usaha/ sub-sektor bidang Kelautan	Nilai PDRB ADH Konstan bidang Kelautan (Milyar Rupiah)/Tahun			Kontribusi Nilai PDRB ADH konstan bidang kelautan (%)/ Tahun		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Perikanan	9.481,06	10.025,28	10.614,16	25,86%	25,71%	26,01%
2	Energi dan	5.814,94	6.144,99	6.376,87	15,86%	15,76%	15,63%

3	Sumberdaya Mineral Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	618,83	609,90	579,76	1,69%	1,56%	1,42%
4	Industri Maritim : - Pengilangan Minyak/Gas Bumi - Industri maritim lainnya	14,28	14,20	13,88	0,04%	0,04%	0,03%
5	Angkutan Laut	2.006,24	1.942,65	1.945,78	5,47%	4,98%	4,77%
6	Angkutan Sungai/ Danau dan Penyeberangan	123,17	131,10	139,59	0,34%	0,34%	0,34%
7	Pariwisata Bahari	3.366,00	3.950,00	4.120,15	9,18%	10,13%	10,10%
8	Bangunan Kelautan	3.445,00	4.256,00	4.451,57	9,40%	10,91%	10,91%
9	Jasa Kelautan lainnya	974,07	997,32	1.025,97	2,66%	2,56%	2,51%
Total Nilai PDRB Sub-Sektor Kelautan		36.666,42	38.994,30	40.809,86	8,32%	8,37%	8,37%
Nilai PDRB Sumatera Utara		440.954,89	465.775,47	487.531,23			

Sumber : Data Sekunder, diolah 2018.

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana pada Tabel 4 menunjukkan pada Tahun 2015 bidang usaha kelautan yang terdiri dari berbagai lapangan usaha/ sektor dan sub-lapangan usaha/sub-sektor dapat memberikan kontribusi sebesar 8,32% terhadap PDRB Propinsi Sumatera Utara, dan kontribusi bidang usaha kelautan ini meningkat menjadi 8,37% pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini menunjukkan bidang usaha kelautan ini berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa sub-lapangan usaha/ sub-sektor industri maritim lainnya memberikan kontribusi paling utama atau terbesar bagi pembentukan PDRB Sektor Kelautan Propinsi Sumatera Utara, yaitu 29,52% tahun 2015 namun mengalami penurunan menjadi 28,01% pada tahun

2016 dan 28,28% tahun 2017. Pada urutan kedua adalah sub-lapangan usaha/sub-sektor perikanan dengan kontribusi sebesar 25,86% tahun 2015 bagi pembentukan PDRB Sektor Kelautan Propinsi Sumatera Utara. Namun mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 25,71% dan meningkat menjadi 26,01% pada tahun 2017.

Pada posisi ketiga adalah sub-lapangan usaha/sub-sektor usaha energi dan sumber daya mineral dengan kontribusi sebesar 15,86% tahun 2015 bagi pembentukan PDRB Propinsi Sumatera Utara, namun mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 15,76% dan 15,63% tahun 2017. Sementara pada urutan ke empat adalah sub-lapangan usaha/sub-sektor bangunan kelautan dengan kontribusi sebesar 9,40% pada tahun 2015 bagi pembentukan PDRB Propinsi Sumatera Utara, dan mengalami peningkatan menjadi 10,91% pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Sementara di urutan kelima ditempati oleh sub-lapangan usaha/sub-sektor pariwisata bahari dengan kontribusi sebesar 9,18% pada tahun 2015 bagi pembentukan PDRB Propinsi Sumatera Utara, dan mengalami peningkatan menjadi 10,13% pada tahun 2016 namun mengalami penurunan menjadi 10,10% pada tahun 2017.

4. Pembangunan Pariwisata Bahari Sumatera Utara

Data KKP (2016) menyampaikan kontribusi sub-lapangan usaha/ sub-sektor pariwisata bahari bagi perekonomian Propinsi Sumatera Utara seharusnya meningkat minimal sebesar 0,1% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Perhitungan ini tentu memiliki landasan yang kuat, dengan asumsi bahwa sumberdaya pulau-pulau kecil yang ada di wilayah ini yang belum dikelola dengan baik. Jika upaya pengembangan pulau-pulau kecil dilakukan secara serius akan dapat mendorong pertumbuhan wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia.

Hasil kajian Kusumastanto dan Karim (2000) menunjukkan nilai ekonomi total suatu pulau kecil di Indonesia bila dikembangkan untuk kawasan wisata mempunyai nilai sebesar US \$ 52.809,37/ ha. Dengan demikian jika pengembangan pariwisata bahari lebih serius, tentu akan memiliki keterkaitan dengan pengembangan pulau-pulau kecil sebagai *specific marine tourism* di Indonesia.

Pembangunan pariwisata bahari pada hakikatnya adalah upaya pemanfaatan obyek serta daya tarik pariwisata bahari di kawasan pesisir Sumatera Utara yaitu; kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna

seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias yang terdapat di perairan Kepulauan Nias dan Pulau-pulau kecil di Pantai Barat Sumatera Utara. Jenis kegiatan wisata bahari yang pada saat ini telah dikembangkan oleh pemerintah dan swasta, adalah; wisata alam, pemancingan, berenang, selancar, berlayar, rekreasi pantai dan wisata pesiar.

Sumberdaya hayati pesisir dan lautan Sumatera Utara seperti populasi ikan hias yang diperkirakan sekitar 263 jenis, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove dan berbagai bentang alam pesisir atau *coastal landscape* yang unik lainnya membentuk suatu pemandangan alamiah yang begitu menakjubkan, sehingga memiliki daya tarik yang besar bagi wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Disamping karena kegiatan ekonomi pesisir ini akan menciptakan *multiflier effect* bagi kegiatan ekonomi lain, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir (Allan *et al*, 2014:130)

Terdapat dua faktor penting dalam strategi pembangunan kegiatan pariwisata bahari yaitu; a) faktor internal berupa strategi terukur manajemen daya tarik objek wisata, yang terkait mulai dari aspek teknis, strategi jasa pelayanan sampai kepada strategi penawaran, b) faktor eksternal berupa dukungan perangkat kebijakan dari pemerintah serta penciptaan iklim keamanan yang kondusif bagi kegiatan pariwisata bahari secara khusus di Sumatera Utara.

Dengan demikian upaya yang dilakukan dalam membenahi strategi pengembangan pariwisata bahari di Sumatera Utara adalah; a) Pengembangan sarana dan prasarana wisata bahari, b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan wisata bahari secara terpadu, c) Penyediaan sistem informasi pariwisata dan program promosi yang tepat. Disamping itu terdapat faktor-faktor non-teknis yang berasal dari unsur kebijakan pemerintah tetapi sangat berperan penting untuk mempengaruhi daya tarik kegiatan wisata, sehingga memerlukan perhatian yang serius, antara lain; a) Kebijakan dalam kemudahan mendapatkan visa bagi kunjungan wisata, b) Memudahkan pengurusan *Cruising Approval For Indonesian Territory, Custom, Immigration, Port Clearance and Quarantine* dan perlunya kemudahan untuk mengurus dokumen-dokumen kepariwisataan lainnya.

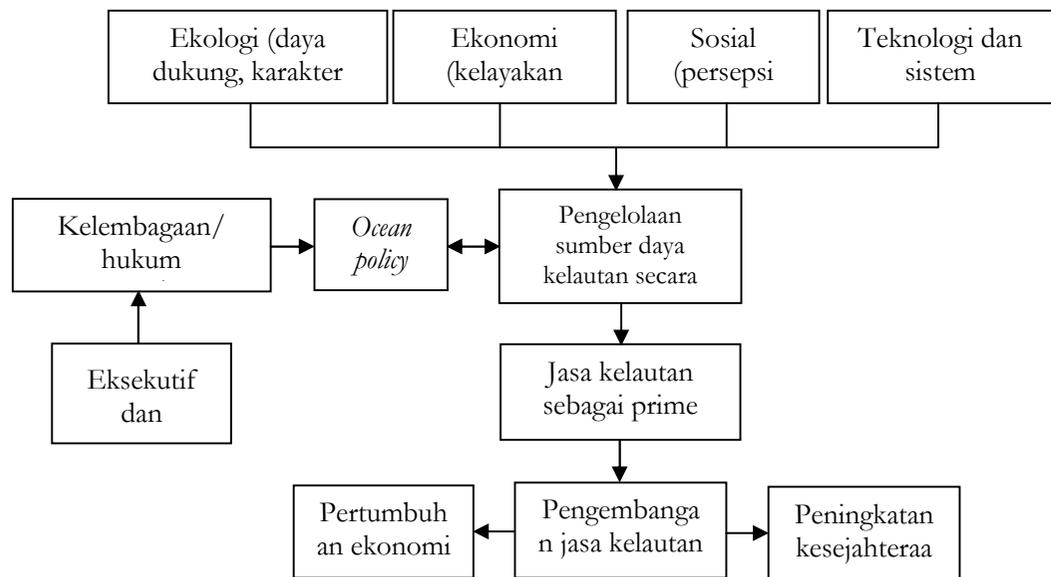
5. Arah Kebijakan Pengembangan Jasa Kelautan Propinsi Sumatera Utara

Pengembangan jasa kelautan mempunyai daya tarik yang luar biasa, artinya jasa kelautan bisa menghela sektor - sektor kelautan untuk menciptakan pertumbuhan dan pusat-pusat perekonomian baru, dan selanjutnya akan berdampak pada masuknya investasi dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

Arah pengembangan jasa kelautan tentu harus mengacu pada suatu kebijakan kelautan (*Ocean Policy*). *Ocean policy* sebagai payung besar kebijakan nasional, dibangun dengan pendekatan kelembagaan yang kajiannya mencakup dua domain dalam pemerintahan, yakni eksekutif dan legislatif. Kebijakan kelautan pada akhirnya menjadi kebijakan ekonomi-politik yang menjadi tanggung jawab bersama pada semua tingkatan institusi eksekutif yang mempunyai keterkaitan kelembagaan maupun sektor pembangunan. Sedangkan, pada level legislatif, perlu diupayakan adalah menciptakan instrumen kelembagaan (peraturan perundang-undangan), mulai dari level pusat hingga daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan (Kusumastanto dan Karim, 2000).

Pengembangan jasa kelautan harus dilakukan secara berkelanjutan (Jacobseb *et al*, 2014:277) dan diarahkan untuk meraih empat tujuan secara seimbang, yakni; 1) pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan dengan jasa kelautan sebagai salah satu penggerak utama (*prime mover*); 2) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, khususnya pemangku kepentingan yang terkait dengan industri jasa kelautan; 3) terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya kelautan; dan 4) menjadikan jasa kelautan sebagai salah satu modal bagi pembangunan kelautan nasional.

Dengan demikian terdapat benang merah yang akan terlihat antara *ocean policy* dan pengelolaan sumberdaya kelautan dengan jasa kelautan sebagai penggerak bagi pertumbuhan sektor kelautan sebagaimana pada Gambar 3.



Gambar 3. Model Alternatif Arah Kebijakan Pengembangan Jasa Kelautan Propinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian kebijakan pengembangan jasa kelautan diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor jasa kelautan secara holistik sehingga dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus, misalnya pengembangan kawasan kluster industri bahari. Sehingga pengembangan jasa kelautan harus secara spesifik dan instansi terkait harus bersinergi untuk pengembangan jasa kelautan di Sumatera Utara.

Dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan diperlukan sumber daya aparatur yang berkompeten yang memiliki kemampuan teknis. Nelayan juga harus memiliki ide kreatif dan inovatif dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan baik melalui kegiatan pelatihan maupun penyuluhan yang dilakukan oleh dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Utara.

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang digunakan serta harus didukung dengan

budidaya yang baik sehingga membantu menyumbang pendapatan daerah. Budidaya yang dilakukan dapat berupa; perikanan air tawar (kolam, mina padi, karamba), budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan air laut (budidaya rumput laut, budidaya ikan di karamba jaring apung).

6. Penutup

Hasil analisis data menunjukkan nilai ICOR untuk sub-lapangan usaha/sub-sektor perikanan di Sumatera Utara 3,210 (Tahun 2016) dan 3,121 (Tahun 2017) yang mengindikasikan sub-lapangan usaha/sub-sektor ini mempunyai prospek yang cukup baik untuk penanaman investasi, sekaligus menunjukkan sub-lapangan usaha/sub-sektor perikanan relatif efisien untuk investasi jika dibandingkan dengan beberapa sub-lapangan usaha/sub-sektor lainnya; b) bidang usaha kelautan yang terdiri dari beberapa sub-lapangan usaha/sub-sektor memiliki nilai rata-rata ICOR 3,368 (Tahun 2016) dan 3,315 (Tahun 2017) yang menunjukkan bahwa bidang usaha kelautan ini relatif efisien untuk investasi jika dibandingkan bidang usahalain/sub-lapangan usaha/sub-sektor lain sebagai pembentuk PDRB Sumatera Utara, c) Nilai ILOR bidang usaha kelautan Sumatera Utara rata-rata 5,837 (Tahun 2016) dan 6,610 (Tahun 2017), yang menunjukkan bahwa bidang usaha kelautan ini merupakan cukup baik dalam menyerap tenaga kerja dalam rangka meningkatkan produksinya, d) Bidang usaha kelautan mampu memberikan kontribusi sebesar 8,32% (Tahun 2015) dan 8,37% (Tahun 2016 dan 2017) terhadap PDRB Propinsi Sumatera Utara, e) Sub-lapanagn usaha/sub-sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 25,8% (Tahun 2015), 25,71% (Tahun 2016) terhadap sektor kelautan dan meningkat menjadi 26,01 % pada tahun 2017.

Pengembangan sektor kelautan dipengaruhi berbagai faktor, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat bersumber dari sarana prasarana yang tidak layak pakai, padahal sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kemudian faktor pendukung berasal dari pembinaan semua pihak yang terkait dalam rangka menambah pengetahuan serta keterampilan di masing-masing bidang kelautan dan perikanan (Adisanjaya, 2009).

Solusi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah melalui;

pendidikan, latihan dan penyuluhan yang mengikutsertakan aparaturnya dinas kelautan dan perikanan dan nelayan serta masyarakat petani ikan hingga ke pelosok daerah. Dalam mendukung pengembangan ekonomi kelautan di Sumatera Utara perlu didirikan koperasi unit desa (KUD) bagi nelayan yang diperlukan untuk pembelian kapal motor, promosi dan perbaikan alat-alat tangkap. Pemerintah daerah diharapkan mampu menangani segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh nelayan dan pembudidaya ikan, serta menambah kelengkapan pendukung untuk para nelayan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan distribusi dana bantuan yang merata pada nelayan-nelayan di daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Sumatera Utara dapat melakukan pengembangan kapasitas (*Capacity Building*), yang diartikan sebagai proses agar individu, organisasi, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan fungsi bahkan memecahkan masalah serta dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan masyarakat dan nelayan. Pengembangan kapasitas ini yang harus diperhatikan terutama yang terkait dengan sistem kebijakan publik, perbaikan struktur organisasi, perbaikan kemampuan manajerial dan kepemimpinan, perbaikan budaya organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi atau lembaga, pengembangan sistem networking, pengembangan, pemanfaatan, dan penyesuaian lingkungan.

Referensi

Adisanjaya, N. (2009). Potensi, produksi sumberdaya ikan di perairan laut Indonesia dan permasalahannya. (<http://www.eafm-indonesia.net/public/files/penelitian/5ae09-Potensi,-Produksi-Sumberdaya-Ikan-Di-Perairan-Laut-Indonesia-Dan-Permasalahannya.pdf>). Diakses pada 24 September 2017.

Allan, GJ, P. Lecca, P.G. McGregor, J.K. Swales. (2014). The economic impacts of marine energy developments: A case study from Scotland. *Journal Marine Policy*. 43 (2014) 122–13. Journal Homepage: www.elsevier.com/locate/marpol.

Anonimus. (2015). Sibolga diminta pacu potensi kelautan. <http://kabar24.bisnis.com/read/20150628/78/448056/sibolga-diminta-pacu-potensi-kelautan-dan-perikanan>), diakses 15 September 2017.

Anonimus. (2014a). Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terapkan pengelolaan kelautan berbasis masyarakat. <http://www.antarasumut.com/berita/141595/pemkab-sergai-terapkan-pengelolaan-kelautan-berbasis-masyarakat>, diakses 16 September 2017.

Anonimus. (2014b). Sumatera Utara dukung program kelautan Jokowi-JK. <http://www.sumutprov.go.id/berita-lainnya/537-sumut-dukung-program-kelautan-jokowi-jk>, diakses 19 September 2017.

Anonimus. (2017). Sibolga Pos Maritim Perikanan, Perdagangan dan Wisata. <https://nasional.sindonews.com/read/1004888/162/sibolga-pos-maritim-perikanan-perdagangan-dan-wisata-bahari-1432520139>, Unduh, 20 September 2017)

Ariani, S., I. Mahyudin dan E. Mahreda. (2014). Peranan sektor perikanan dalam pembangunan wilayah dan strategi pengembangannya dalam rangka otonomi daerah Kabupaten Bangkalan. *Fish Scientiae*. Vol 4 (8) hal 110 -120.

BPS. (2017). Sumatera Utara Dalam Angka. Biro Pusat Statistik Sumatera Utara. Medan.

BPS. (2017). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha 2013-2017. Biro Pusat Statistik Sumatera Utara. Medan.

BPS. (2016). Kota Sibolga Dalam Angka. Biro Pusat Statistik Kota Sibolga. Sibolga.

BPS. (2016). Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka. Biro Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai. Sei Rampah.

Darsono, Prapto (1999). Pemanfaatan sumber daya laut dan implikasinya Bagi masyarakat nelayan *Jurnal Oseana*, Volume XXIV, Nomor 4, 1999 : 1-9. ISSN 0216-1877.

Daryanto, A. dan Yundy, H. (2010). Analisis input-output dan social accounting matrix: untuk pembangunan ekonomi daerah. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

DKP Sumatera Utara. (2015). Potensi kelautan dan perikanan provinsi Sumatera Utara. (http://dkp.sumutprov.go.id/uptd_1_profil.php?kat=potensi). Diakses pada 19 September 2017.

Hamidi, W., R. B. Ningsih dan M. Sari. (2011). Kontribusi sektor perikanan dalam peningkatan perekonomian Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 19 (2).

- Jacobsen, Kelsey I, Sarah E. Lester, Benjamin S. Halpern. (2014). A global synthesis of the economic multiplier effects of marine sectors. *Journal Marine Policy* 44 (2014) 273–278. Journal Homepage: www.elsevier.com/locate/marpol.
- Ikbar Al Asyari. (2015). Potensi Sumatera Utara. [https:// ikbar-alasyari.blogspot.co.id/2015/12/ potensi-sumberdaya-perikanan-di.html](https://ikbar-alasyari.blogspot.co.id/2015/12/potensi-sumberdaya-perikanan-di.html), diakses 23 September 2017.
- Irawan, Yeni. (2010). Analisis *incremental capital output ratio* di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 9, No. 2, Agsutus 2010. ISSN 1693-8852.
- KKP.(2015). Laporan kinerja Kementerian Kelautan Perikanan. [http:// roren.kkp.go.id/ arsip/c/126 / leaflet – kinerja – kementerian – kelautan - dan -perikanan-tahun-2015/? category_id=](http://roren.kkp.go.id/arsip/c/126/leaflet-kinerja-kementerian-kelautan-dan-perikanan-tahun-2015/?category_id=).
- KKP. (2016). Wajah KKP2016. <http://rumahkaca.id/wajah-kkp-2016-sasaran-strategis-meleset-dan-program-2017/>, diakses 21 September 2017.
- Kusumastanto, T dan Muhammad, Karim. (2000). Skenario investasi tambak udang. *Majalah Komoditas*. No.27 Tahun II Tanggal 18 - 1 November 2000.
- Liu, Baiqiong, Min Xu, Jing Wang. (2017). Regional disparities in China's marine economy. *Journal Marine Policy* 82 (2017) 1–7. Journal Homepage: www.elsevier.com/locate/marpol.
- Mairisa. (2017). Analisis ketimpangan wilayah berdasarkan PDRB dan PAD antara Riau Daratan dengan Riau Pesisir (*Analysis disparities region based on the PDRB and PAD between Riau Mainland with Riau Coastal*). *JOM Fekon*, Vol. 4 No.1.
- Mira. (2013). Keunggulan sub sektor perikanan dan pariwisata dalam struktur perekonomian wilayah Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. Vol 8 (2) hal.145-156.
- Nurhuda, Rama., Muluk, M. R. Khairul., Prasetyo, Wima, Yudo. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011), (*Disparities Of Development Analysis (Study in East Java Province 2005-2011)*). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*,1 (4):110-119
- Panggabean, Muhammad, Aspan. (2016). Studi peran subsektor perikanan dalam pengembangan wilayah di Kota sibolga (*Study of Fisheries Subsector in Supporting Regional Development in Sibolga*). *Jurnal Il. Tan. Lingk.*, 18 (1) April 2016: 49-55 ISSN 1410-7333.
- Rinanti, P. (2013). Analisis peranan sub-sektor perikanan terhadap produk domestik bruto di Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol 1 (2).
- Rizal, A. (2013). Kinerja sektor perikanan Provinsi Banten. *Jurnal Akuatika*. Vol 4 (1) hal 21-34.
- Syarief, A., E. Rustiadi dan A. Hidayat (2014). Analisis sub-sektor perikanan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Indramayu. *Jurnal Tataloka*. Vol 16 (2) hal 84-93.
- Tatali, A. A., E. Mantjoro dan F. V. Longdong. (2013). Perkembangan ekonomi sub-sektor perikanan di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Platax*. Vol 1(2) hal 81-86.
- WWF. (2014). Stok ikan Indonesia mulai menurun, bisnis perikanan terancam. (<http://www.wwf.or.id/?33762/stok-ikan-indonesia-mulai-menurun-bisnis-perikanan-terancam>). 24 September 2017.